



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; F. Komite I DPD RI; G. Bupati Bintan; H. Bupati Lampung Selatan; I. Bupati Lampung Tengah; J. Bupati Lampung Utara; K. Bupati Batang Hari; L. Bupati Kerinci;

- M. Pj. Bupati Merangin;
- N. Walikota Jambi;
- O. Bupati Bengkalis;
- P. Bupati Indragiri Hulu;
- Q. Bupati Kampar; dan
- R. Walikota Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Bintan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, Bupati Batang Hari, Bupati Kerinci, Pj. Bupati Merangin, Walikota Jambi, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Kampar, dan Walikota Pekanbaru, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, hari Senin, 24 Juni 2024, dibuka pukul 10.34 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Bintan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, Bupati Batang Hari, Bupati Kerinci, Pj. Bupati Merangin, Walikota Jambi, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Kampar, dan Walikota Pekanbaru, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu:

Masukan Terhadap RUU Kabupaten/Kota:

Terdapat 3 kabupaten yang menerima rumusan dalam draft RUU kab/kota yaitu: Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara.

No.	Nama Kab/Kota	Usulan Perubahan			
		Nama Kecamatan	Tanggal Hari Jadi	Karakteristik	Ibukota
1.	Kabupaten Lampung Tengah	Way Pengabuan menjadi Way Pangubuan			

2.	Kabupaten Bengkulu		Tanggal 30 Juli berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 20 Tahun 2004	Tidak ada pegunungan dan perbukitan	
3.	Kabupaten Kampar			Hanya dikelilingi gugusan Bukit Barisan, tidak ada pegunungan	Kecamatan Bangkinang Kota
4.	Kota Pekanbaru	Tidak menyebutkan secara rinci nama kecamatan	Perubahan tanggal hari jadi		
5.	Kota Jambi		Tanggal 23 Mei diubah menjadi 28 Mei		
6.	Kabupaten Merangin	Kecamatan Sungai Tenang berubah menjadi Kecamatan Jangkat Timur	Tanggal 22 Desember berdasarkan peraturan daerah	Penambahan karakteristik diatur melalui peraturan daerah (disebutkan dalam norma RUU)	
7.	Kabupaten Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan Kecamatan Bukit Kerman (dipisah) • UU No. 12 Tahun 1956 diganti dengan UU No. 58 Tahun 1958 			
8.	Kabupaten Batang Hari	Penulisan Batang Hari (dipisah)		<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan potensi pertanian dan peternakan • Tidak punya desa adat • Penulisan titik koordinat wilayah pada norma RUU 	
9.	Kabupaten Indragiri Hulu	Nama Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Indragiri	Tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2023.		

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian

Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Bintan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, Bupati Batang Hari, Bupati Kerinci, Pj. Bupati Merangin, Walikota Jambi, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Kampar, dan Walikota Pekanbaru, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, yaitu:

Masukan dari kepala daerah akan dibahas pada RDP Panja dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.05 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2024

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462